



PERATURAN DESA KALILUNJAR
KECAMATAN BANJARMANGU
KABUPATEN BANJARNEGARA

NOMOR 1 TAHUN 2026

TENTANG

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA (APBDesa)
TAHUN ANGGARAN 2025



KEPALA DESA KALILUNJAR
KABUPATEN BANJARNEGARA

PERATURAN DESA KALILUNJAR
NOMOR 1 TAHUN 2026

TENTANG

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KALILUNJAR,
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA KALILUNJAR,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan perlu dipertanggungjawabkan pelaksanaannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2004 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 61);

3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa Dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah

Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);

11. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
12. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
13. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 160);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);

21. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262);
22. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);
23. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
24. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
25. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
26. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 34 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Pada Pemerintah Desa (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 34);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Banjarnegara 2005-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Banjarnegara 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012 Nomor 2 Seri E);

28. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjarnegara 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembara Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 145);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 Nomor 3);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 246);
31. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 27 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2018 Nomor 27);
32. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 28 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2018 Nomor 28);
33. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 47 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Aal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2018 Nomor 47);
34. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 76 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2018 Nomor 76) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 76 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2019 Nomor 70);
35. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 49 Tahun 2019

tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 29 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2019 Nomor 49);

36. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 50 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penghitungan Besaran Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2019 Nomor 50);
37. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 51 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2019 Nomor 51);
38. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 19 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020 Nomor 19);
39. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 47 Tahun 2019 tentang Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 Nomor 9);
40. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2025 Nomor 10);
41. Peraturan Desa Kalilunjar Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Desa Kalilunjar Tahun 2018 Nomor 4);
42. Peraturan Desa Kalilunjar Nomor 6 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Kalilunjar Tahun 2018 Nomor 6);
43. Peraturan Desa Kalilunjar Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan BUMDesa “Bakti Usaha” Desa Kalilunjar Kecamatan Banjarmangu Kabupaten Banjarnegara (Lembaran Desa Kalilunjar Tahun 2021 Nomor 5);
44. Peraturan Desa Kalilunjar Nomor 10 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Desa Kalilunjar

Nomor 7 Tahun 2018 tentang Sususnan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Kalilunjar (Lembaran Desa Kalilunjar Tahun 2022 Nomor 10);

45. Peraturan Desa Kalilunjar Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Desa Kalilunjar Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Kalilunjar Tahun 2020-2027 (Lembaran Desa Kalilunjar Tahun 2024 Nomor 4);
46. Peraturan Desa Kalilunjar Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025 (Lembaran Desa Kalilunjar Tahun 2023 Nomor 4) Sebagaimana Telah diubah dengan Peraturan Desa Kalilunjar Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Desa Kalilunjar Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Kalilunjar Tahun 2025 (Lembaran Desa Kalilunjar Tahun 2025 Nomor 3);
47. Peraturan Desa Kalilunjar Nomor 4 Tahun 2025 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Desa Kalilunjar Pada Badan Usaha Milik Desa “Bakti Usaha” Desa Kalilunjar Kecamatan Banjarmangu Kabupaten Banjarnegara Tahun 2025 (Lembaran Desa Kalilunjar Tahun 2025 Nomor 4);
48. Peraturan Desa Kalilunjar Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Desa Kalilunjar Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kalilunjar Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Kalilunjar Tahun 2025 Nomor 5);
49. Peraturan Kepala Desa Kalilunjar Nomor 3 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Kedua Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kalilunjar Tahun Anggaran 2025 (Berita Desa Kalilunjar Tahun 2025 Nomor 3).

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KALILUNJAR
dan
KEPALA DESA KALILUNJAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG LAPORAN

PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN
ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 dengan perincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp.	2.760.231.532
2. Belanja Desa		
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah	Rp.	683.858.735
b. Bidang Pembangunan Desa	Rp.	1.445.841.082
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp.	54.543.750
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp.	264.614.000
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa	Rp.	51.300.000
Jumlah Belanja	Rp.	2.500.157.567
Surplus/Defisit	Rp.	260.073.567

=====

3. Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	65.246.273
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	255.635.400
Selisih Pembiayaan (a – b)	Rp.	69.684.838

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini yang terdiri dari:

- a. Lampiran I : Laporan Keuangan;
- b. Lampiran II : Laporan Realisasi Kegiatan Periode 01 Januari –31 Desember Tahun Anggaran 2025;
- c. Lampiran III : Daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke Desa.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa dan berita Desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di Kalilunjar

pada tanggal 22 Januari 2026

KEPALA DESA KALILUNJAR,



SARKUM SLAMET RAHARJO

Diundangkan di Kalilunjar

pada tanggal 23 Januari 2026

SEKRETARIS DESA KALILUNJAR

NIKMATULLOH

LEMBARAN DESA KALILUNJAR TAHUN 2026 NOMOR 1

LAMPIRAN I : PERATURAN DESA KALILUNJAR
NOMOR : 1 TAHUN 2026
TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI APB
DESA TAHUN 2025

**LAPORAN KEUANGAN
DESA KALILUNJAR
KECAMATAN BANJARMANGU
PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA**

Daftar Isi

I Laporan Realisasi APBDes

II Catatan Atas Laporan Keuangan

- A. Informasi Umum
- B. Dasar Penyajian Laporan Keuangan
- C. Rincian Pos Laporan Realisasi Anggaran
 - 1 Rekonsiliasi SILPA dan Kas
 - 2 Pendapatan Asli Desa
 - 3 Dana Desa
 - 4 Bagian dari hasil pajak dan Retribusi Daerah
 - 5 Alokasi Dana Desa
 - 6 Bantuan Keuangan Propinsi
 - 7 Bantuan Keuangan Kabupaten
 - 8 Pendapatan Lain lain
 - 9 Belanja Bidang Penyelenggaraan pemerintah Desa
 - 10 Belanja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
 - 11 Belanja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
 - 12 Belanja Bidang Pemberdayaan Kemasyarakatan Desa
 - 13 Belanja Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa
 - 14 Belanja Desa dalam Klasifikasi Ekonomi
 - 15 Belanja Desa dalam Klasifikasi Sub Bidang (Fungsi)
 - 16 Pembiayaan
 - 17 Aset Desa
 - 18 Penyertaan Modal Desa

Lampiran

Lampiran 1 - Rincian Aset Tetap Desa

Lampiran 2 - Laporan Realisasi Kegiatan Semester Akhir Tahun

Catatan Atas Laporan Keuangan
Pemerintah Desa Kalilunjar Kecamatan Banjarmangu Kabupaten Banjarnegara
Tahun Anggaran 2025

A. Informasi Umum

Pemerintah Desa Kalilunjar merupakan desa di Kecamatan Banjarmangu, Kabupaten Banjarnegara. Sesuai dengan Peraturan Desa No 10 Tahun 2022, saat ini kepengurusan Pemerintahan Desa Kalilunjar

1. Kepala Desa : Sarkum Slamet Raharjo
2. Sekretaris Desa : Nikmatulloh
3. Bendahara Desa : Nipin

Kantor Pemerintahan Desa beralamat di Jalan Raya Karangobar Km 14 Desa Kalilunjar Kecamatan Banjarmangu, Kabupaten Banjarnegara

B. Dasar Penyajian Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Desa berupa Laporan Realisasi APBDes sesuai basis kas dengan dasar harga perolehan. Pendapatan dicatat pada saat kas diterima di Bank atau Kas dan Belanja dicatat pada saat kas dikeluarkan dan telah bersifat definitif.

C. Rincian Pos Laporan Keuangan

1. Rekonsiliasi SILPA dan Kas

SILPA tahun anggaran 2025

Mutasi Potongan Pajak

- Saldo Awal Periode Potongan Pajak yg belum disetor ke Kas Negara
- Penerimaan Potongan Pajak tahun anggaran berjalan
- Setoran Pajak ke Kas Negara selama tahun anggaran berjalan
- Saldo Akhir Periode Potongan Pajak yg belum disetor ke Kas Negara

Saldo Kas per 31 Desember 2025

2. Pendapatan Asli Desa

Pendapatan Asli Desa terdiri dari:

Pendapatan Asli Desa terdiri dari:

a. Hasil Usaha
b. Hasil Aset
c. Swadaya, partisipasi, dan Gotong Royong
d. Lain-lain PADes yang sah

Anggaran	Realisasi	(Lebih/ Kurang)
27.711.127	27.711.127	0
12.750.000	12.750.000	0
0	0	
0	0	
JUMLAH :	40.461.127	40.461.127
		0

3. Dana Desa

Dana Desa merupakan penerimaan desa yang diperoleh dari APBN. Jumlah penerimaan Dana Desa selama tahun anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

Tahap I
Tahap II
Tahap III

Anggaran	Realisasi	(Lebih/ Kurang)
694.077.400	694.077.400	0
563.203.600	563.203.600	0
		0
JUMLAH :	1.257.281.000	1.257.281.000
		0

4. Bagian dari hasil pajak dan Retribusi Daerah

Penerimaan Desa yang berasal dari Bagian dari hasil pajak dan Retribusi Daerah adalah sebagai

Tahap I
Tahap II
Tahap III

Anggaran	Realisasi	(Lebih/ Kurang)
18.306.500	18.306.500	0
56.893.500	56.893.500	0
0	0	
JUMLAH :	75.200.000	75.200.000
		0

5. Alokasi Dana Desa (ADD)

Penerimaan Desa yang berasal dari Alokasi Dana Desa (ADD) adalah sebagai berikut:

Anggaran	Realisasi	(Lebih/ Kurang)
----------	-----------	--------------------

Tahap I	142.692.840	142.692.840	0
Tahap II	142.692.812	142.692.812	0
Tahap III	142.682.812	142.682.812	0
Tambahan	0	0	
JUMLAH :	428.068.464	428.068.464	0

6. Bantuan Keuangan Propinsi

Penerimaan Desa yang berasal dari Bantuan Keuangan Propinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut:

	Anggaran	Realisasi	(Lebih/ Kurang)
Tahap I	0	0	0
Tahap II	0	0	0
Tahap III	0	0	0
Tahap IV	0	0	
JUMLAH :	0	0	0

7. Bantuan Keuangan Kabupaten/kota

Penerimaan Desa yang berasal dari Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota Banjarnegara adalah sebagai

	Anggaran	Realisasi	(Lebih/ Kurang)
Tahap I	400.000.000	400.000.000	
Tahap II	150.000.000	150.000.000	
Tahap III	400.000.000	400.000.000	
JUMLAH :	950.000.000	950.000.000	0

8. Pendapatan Lain-lain

Pendapatan lain-lain terdiri dari:

	Anggaran	Realisasi	(Lebih/ Kurang)
Penerimaan dari hasil kerjasama antar Desa			
Penerimaan dari hasil kerjasama Desa dengan pihak ketiga			
Penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di desa			
Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga			
Koreksi kesalahan belanja tahun-tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas desa			
Bunga bank			
Lain-lain pendapatan yang sah			
sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas desa			
Bunga bank	2.100.000	4.726.461	2.626.461
Lain-lain pendapatan yang sah			
JUMLAH :	2.100.000	4.726.461	2.626.461

9. Belanja - Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Belanja untuk Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa terdiri dari:

	Anggaran	Realisasi	(Lebih/ Kurang)
Belanja Pegawai	439.382.400	439.133.280	249.120
Belanja Barang dan Jasa	195.277.402	191.057.473	4.219.929
Belanja Modal	53.743.282	53.667.982	75.300
JUMLAH :	688.403.084	683.858.735	4.544.349

10. Belanja - Bidang Pembangunan Desa

Belanja untuk Bidang Pembangunan Desa terdiri dari:

	Anggaran	Realisasi	(Lebih/ Kurang)
Belanja Barang dan Jasa	149.047.748	120.767.600	28.280.148
Belanja Modal	1.346.881.300	1.325.073.482	21.807.818
JUMLAH :	1.495.929.048	1.445.841.082	50.087.966

11. Belanja - Bidang Pembinaan Kemasyaratan Desa

Belanja untuk Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa terdiri dari:

	Anggaran	Realisasi	(Lebih/ Kurang)
Belanja Barang dan Jasa	54.543.750	54.543.750	0
Belanja Modal	0	0	
JUMLAH :	54.543.750	54.543.750	0

12. Belanja - Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
 Belanja untuk Bidang Perberdayaan Masyarakat Desa terdiri dari:

	Anggaran	Realisasi	(Lebih/ Kurang)
Belanja Barang dan Jasa	116.637.968	107.697.000	8.940.968
Belanja Modal	157.981.150	156.917.000	1.064.150
JUMLAH :	274.619.118	264.614.000	10.005.118

13. Belanja - Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa
 Selama tahun anggaran 2025, Pemerintahan Desa melakukan penanggulangan bencana dan keadaan darurat sebagai beri

	Anggaran	Realisasi	(Lebih/ Kurang)
Belanja Tidak Terduga	54.000.000	51.300.000	2.700.000
.....			
JUMLAH :	54.000.000	51.300.000	2.700.000

14. Belanja Desa dalam klasifikasi ekonomi
 Jumlah belanja dalam klasifikasi ekonomi adalah sebagai berikut

	Anggaran	Realisasi	(Lebih/ Kurang)
Belanja Pegawai			
Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	43.104.000	43.104.000	0
Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	333.336.000	333.336.000	0
Jaminan Kesehatan Kepala Desa dan Perangkat Desa	3.510.000	3.510.000	0
Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa dan Perangkat Desa	32.432.400	32.580.513	-148.113
Tunjangan BPD	27.000.000	27.000.000	0
JUMLAH :	439.382.400	439.530.513	-148.113
Belanja Barang dan Jasa			
Belanja Barang Perlengkapan Kantor	74.736.302	69.347.552	5.388.750
Belanja Jasa Honorarium	222.700.000	220.300.000	2.400.000
Belanja Operasional Aparatur Desa	0	0	0
Belanja Jasa Sewa	5.000.000	5.000.000	0
Belanja Operasional Perkantoran	28.069.956	14.175.771	13.894.185
Belanja Pemeliharaan	14.250.000	14.237.500	12.500
Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada	111.718.000	93.170.000	18.548.000
JUMLAH :	456.474.258	416.230.823	40.243.435
Belanja Modal			
Belanja Modal Pengadaan Tanah			
Belanja Modal Peralatan, Mesin, dan Alat Berat	20.000.000	19.425.182	574.818
Belanja Modal Kendaraan	0	0	0
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	746.797.532	736.307.582	10.489.950
Belanja Modal Jalan	729.753.500	718.921.000	10.832.500
Belanja Modal Jembatan	0	0	0
Belanja Modal Irigasi/Embung/Air Sungai/Drainase	0	0	0
Belanja Modal Jaringan/Instalasi	25.761.000	24.826.000	935.000
Belanja Modal lainnya	36.293.700	33.178.700	0
JUMLAH :	1.558.605.732	1.532.658.464	22.832.268

15. Belanja Desa dalam klasifikasi Sub Bidang (Fungsi)

	Anggaran	Realisasi	(Lebih/ Kurang)
Bidang Penyelenggaraan pemerintahan Desa			
Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	539.113.802	537.364.753	1.749.049
Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa	53.743.282	53.667.982	75.300
Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil,	7.430.000	7.430.000	0

Statistik dan Kearsipan	80.516.000	77.796.000	2.720.000
Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan			
Sub Bidang Pertanahan	7.600.000	7.600.000	0
JUMLAH :	688.403.084	683.858.735	4.544.349
Bidang Pembangunan Desa	0	0	0
Sub Bidang Pendidikan	151.626.748	128.920.098	22.706.650
Sub Bidang Kesehatan	750.000.000	739.067.500	10.932.500
Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	26.006.000	25.071.000	935.000
Sub Bidang Kawasan Permukiman	0	0	0
Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	56.296.000	51.213.684	5.082.316
Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informasi	0	0	0
Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	512.000.300	501.568.800	10.431.500
Sub Bidang Pariwisata			
JUMLAH :	1.495.929.048	1.445.841.082	50.087.966
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	6.243.750	6.243.750	0
Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat			
Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	48.300.000	48.300.000	0
Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga	0	0	0
Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	0	0	0
JUMLAH :	54.543.750	54.543.750	0
Belanja - Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	0	0	0
Sub Bidang Kelautan dan Perikanan	157.981.150	156.917.000	0
Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	2.100.000	0	2.100.000
Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	114.537.968	107.697.000	6.840.968
Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	0	0	0
Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	0	0	0
Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	0	0	0
Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	0	0	0
JUMLAH :	274.619.118	264.614.000	8.940.968
Belanja - Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa	0	0	0
Sub Bidang Penanggulangan Bencana	0	0	0
Sub Bidang Keadaan Darurat	54.000.000	51.300.000	2.700.000
Sub Bidang Keadaan Mendesak			
JUMLAH :	54.000.000	51.300.000	2.700.000

16. Pembiayaan

Jumlah netto pembiayaan tahun anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

	Anggaran	Realisasi	(Lebih/ Kurang)
Penerimaan Pembiayaan	65.246.273	65.246.273	0
Pengeluaran Pembiayaan	255.635.400	255.635.400	0
JUMLAH :	-190.389.127	-190.389.127	0
Penerimaan Pembiayaan terdiri dari:			
1. SILPA tahun anggaran sebelumnya	65.246.273	65.246.273	0
2. Pencairan Dana Cadangan	0	0	
3. Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang dipisahkan	0	0	
JUMLAH :	65.246.273	65.246.273	0
Pengeluaran Pembiayaan terdiri dari:			
1. Pembentukan Dana Cadangan	0	0	0
2. Penyertaan Modal Desa	255.635.400	255.635.400	0
JUMLAH :	255.635.400	255.635.400	0

17. Aset Desa

Perolehan aset desa adalah sebagai berikut :

	2024	2025	Penambahan/ (Pengurangan)
Tanah	0	0	0
Peralatan, Mesin, dan Alat Berat	47.656.250	19.425.182	67.081.432
Kendaraan	0	0	0

Gedung dan Bangunan	561.416.100	736.307.582	1.297.723.682
Jalan	428.162.000	718.921.000	1.147.083.000
Jembatan	0	0	0
Irigasi/Embung/Air Sungai/Drainase	0	0	0
Jaringan/Instalasi	24.826.000	24.826.000	49.652.000
Aset Tetap lainnya	0	0	0
Konstruksi dalam Pengerjaan	0	0	0
JUMLAH :	1.062.060.350	1.499.479.764	2.561.540.114

Rincian Aset Tetap dapat untuk masing-masing klasifikasi diatas dapat dilihat pada lampiran 1

18. Penyertaan Modal Desa

Pernyertaan Modal Desa pada BUMDes adalah sebagai berikut,

	2024	2025	Penambahan/ (Pengurangan)
BUMDes Bhakti Usaha	27.499.312	255.635.400	283.134.712
BUMDESMA BCS	0	0	0
BUMDESMA LKT	0	0	0
JUMLAH :	27.499.312	255.635.400	283.134.712

19 Hasil Pengelolaan Tanah Bengkok

Yang digunakan sebagai tambahan tunjangan adalah sebagai berikut:

	2024	2025	Penambahan/ (Pengurangan)
Kepala Desa	1.500.000	1.500.000	0
Sekretaris Desa.	1.250.000	1.250.000	0
Kepala Urusan Keuangan	1.000.000	1.000.000	0
Kepala Urusan TU dan Umum	1.000.000	1.000.000	0
Kepala Urusan Perencanaan	1.000.000	1.000.000	0
Kepala Seksi Pemerintahan	1.000.000	1.000.000	0
Kepala Seksi Kesejahteraan	1.000.000	1.000.000	0
Kepala Seksi Pelayanan	1.000.000	1.000.000	0
Kepala Dusun I	1.000.000	1.000.000	0
Kepala Dusun II	1.000.000	1.000.000	0
Kepala Dusun III	1.000.000	1.000.000	0
Kepala Dusun IV	1.000.000	1.000.000	0
JUMLAH	10.750.000	10.750.000	0

Kalilunjar, 22 Januari 2026
Kepala Desa Kalilunjar

G. KUM SLAMET RAHARJO

PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA KECAMATAN BANJARMANGU KEPALA DESA KALILUNJAR Sekretariat : Jalan Raya Karang Kobar Km 14 Banjarnegara				LAPORAN REALISASI KEGIATAN PERIODE 01 JANUARI-31 DESEMBER (SEMESTER KEDUA) TAHUN ANGGARAN 2025									
KODE REKENING	URAIAN	NAMA OUTPUT	OUTPUT						SUMBER DANA				
			RENCANA			REALISASI			DD (Rp)	ADD (Rp)	LAIN-LAIN (Rp)	BENTUK LAIN	
			VOL	SATUAN	ANGGARAN (Rp)	VOL	SATUAN	ANGGARAN (Rp)					CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
a	b	c											
1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa												
1	1	Sub Bidang Penyelenggaraan Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa			539.113.802			537.364.753					
1	1	Penyediaan Penghasilan dan Tunjangan Kepala Desa	1	Org	43.104.000	1	Org	43.104.000	100		41.604.000	1.500.000	
1	1	Penyediaan Siltap dan Tunjangan Perangkat Desa	11	Org	333.336.000	11	Org	333.336.000	100		322.086.000	11.250.000	
1	2	Penyediaan Jaminan Sosial Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	12	Org	35.942.400	12	Org	35.693.280	99		21.902.400	13.790.880	
1	1	Penyediaan Operasional Pemerintahan Desa	1	Thn	57.988.402	1	Thn	58.921.473	102		16.739.600	41.248.802	
1	1	Penyediaan Tunjangan BPD	7	Org	27.000.000	7	Org	27.000.000	100		27.000.000		
1	1	Penyediaan Operasional BPD	1	Thn	4.025.000	1	Thn	1.710.000	42			1.710.000	
1	1	Penyediaan Operasional Pemerintahan Desa yang Bersumber dari Dana Desa	1	Thn	37.718.000	1	Thn	37.600.000	100	37.600.000			
1	2	Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa			53.743.282			53.667.982					
1	2	Pemeliharaan Gedung Kantor Desa	1	Keg	9.474.382	1	Keg	9.474.382	100			9.474.382	
1	2	Pembangunan Gedung Kantor Desa	1	Keg	44.268.900	1	Keg	44.193.600	100			44.193.600	
1	3	Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan			7.430.000			7.430.000					
1	3	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan Akte dan KK	1	Thn	3.920.000	1	Thn	3.920.000	100			3.920.000	
1	3	Pendataan Desa	1	Keg	3.510.000	1	Keg	3.510.000	100	3.510.000			
1	4	Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan			80.516.000			77.796.000					
1	4	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa	1	Thn	48.720.000	1	Thn	48.400.000	99	48.400.000			
1	4	Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya	1	Thn	8.000.000	1	Thn	8.000.000	100	8.000.000			
1	4	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa	1	Keg	23.796.000	1	Keg	21.396.000	90	21.396.000			
1	5	Sub Bidang Pertanian			7.600.000			7.600.000					

1	5	06	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan	Intensifikasi Pajak Daerah	1	Keg	7.600.000	1	Keg	7.600.000	100			7.600.000
2														
2	2		Bidang Pelaksanaan Pembangunan				1.495.929.048			1.445.841.082				
2	2		Sub Bidang Kesehatan				151.626.748			128.920.098				
2	2	02	Penyelenggaraan Posyandu	PMT dan Insentif Kader Posyandu	1	Thn	95.513.150	1	Thn	73.170.000	77	73.170.000		
2	2	09	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Posyandu	Rehab Gedung Posyandu	1	Keg	51.375.000	1	Keg	51.011.500	99	51.375.000		
2	2	91	Pemeliharaan Sarana Prasarana Mobil Ambulance Desa	Pemeliharaan Mobil Ambulance	1	Keg	4.738.598	1	Keg	4.738.598	100		4.738.598	
2	3		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang				750.000.000			739.067.500				
2	3	10	Pembangunan Jalan Desa	Pembangunan Rabat Beton Jalan Desa	3	Keg	350.000.000	3	Keg	345.139.500	99		345.139.500	
2	3	11	Pembangunan Jalan Lingkungan	Pembangunan Rabat Beton Jalan Lingkungan	1	Keg	100.000.000	1	Keg	98.518.000	99		98.518.000	
2	3	14	Pembangunan Prasarana Jalan	Pembangunan Talud dan Drainase Jalan Desa	2	Keg	200.000.000	2	Keg	196.981.000	98		196.981.000	
2	3	90	Pembangunan Talud Pengaman Tebing	Pembangunan Talud Pengaman Permukiman	1	Keg	100.000.000	1	Keg	98.429.000	98		98.429.000	
2	4		Sub Bidang Kawasan Permukiman				26.006.000			25.071.000				
2	4	12	Peningkatan Sambungan Air Bersih Ke Rumah Tangga	Peningkatan debit air bersih	1	Keg	26.006.000	1	Keg	25.071.000	0	26.006.000		
2	6		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika				56.296.000			51.213.684				
2	6	02	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa	Pembuatan Baner Informasi	1	Thn	7.000.000	1	Thn	6.900.000	99	6.900.000		
2	6	92	Pemeliharaan Jaringan Internet Untuk Warga Desa/Website Desa	Bayar Internet dan Pengadaan Alat	1	Keg	49.296.000	1	Keg	44.313.684	90	49.296.000		
2	8		Sub Bidang Pariwisata				512.000.300			501.568.800				
2	8	01	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa	Perawatan Angkutan Wisata, Perawatan Tempat wisata	3	Keg	77.000.300	3	Keg	74.854.300	97	74.854.300		
2	8	02	Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa	Peningkatan Kolam Renang Milik Desa	1	Keg	235.000.000	1	Keg	228.790.800	97	228.790.800		
2	8	93	Pengembangan Desa Wisata	Pembangunan Sarpras Desa Wisata berupa Gedung Serbaguna	1	Keg	200.000.000	1	Keg	197.923.700	99		197.923.700	
3							54.543.750			54.543.750				
3	1		Bidang Pembinaan Kemasyarakatan				6.243.750			6.243.750				
3	1	04	Pelatihan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	Pengadaan seragam relawan destana	1	Pkt	6.243.750	1	Pkt	6.243.750	100		6.243.750	
3	2		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan				48.300.000			48.300.000				
3	2	03	Penyelenggaraan Festival Kesenian Adat/Kebudayaan /Keagamaan	Penyelenggaraan Kirab Budaya Desa	1	Keg	48.300.000	1	Keg	48.300.000		48.300.000		
4			Bidang Pemberdayaan Masyarakat				274.619.118			264.614.000				

4	2	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan						157.981.150			156.917.000				
4	2	Peningkatan Produksi Peternakan				Pembuatan Kandang Ayam	1	Keg	1	Keg	156.917.000	99		156.917.000	
4	3	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa						2.100.000			0				
4	3	Peningkatan Kapasitas BPD				Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	1	Keg	0	Keg	0				
4	4	Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga						114.537.968			107.697.000				
4	4	Pengelolaan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga				Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga	1	Keg	1	Keg	5.097.000	72		5.097.000	
4	4	Bantuan Insentif untuk Kader Kesehatan masyarakat / Guru Paud				Insentif Kader Kesehatan dan guru PAUD	1	Thn	1	Thn	102.600.000	98		102.600.000	
4	4	Jaminan Sosial Bagi Masyarakat dan Lembaga Kemasyarakatan Desa				Jaminan Ketenagakerjaan Lembaga Kemasyarakatan Desa	1	Keg			0				
5		Bidang Penanggulangan Bencana, Keadan Darurat dan Mendesak						54.000.000			51.300.000				
5	3	Sub Bidang Keadan Mendesak						54.000.000			51.300.000				
5	3	Keadan Mendesak				BLT DD	1	Thn	1	Thn	51.300.000	95		51.300.000	
		JUMLAH BELANJA						2.567.495.000			2.500.157.567				

Kaliunjar, 22 Januari 2026
Kepala Desa Kaliunjar



Lampiran III Peraturan Desa Kalilunjar
Nomor : 1 Tahun 2026
Tentang Laporan Pertanggungjawaban
Realisasi Pelaksanaan APBDesa
Tahun Anggaran 2025

PROGRAM SEKTORAL DAN PROGRAM DAERAH YANG MASUK KE DESA

Tanggal : 31 Desember 2025
Desa : Kalilunjar
Kecamatan : Banjarmangu
Kabupaten : Banjarnegara

NO	JENIS KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	RINCIAN KEGIATAN	VOLUME	SATUAN	SUMBER DANA	JUMLAH (Rp)
Sub Total Jenis Kegiatan (1)							
	Nihil						
Sub Total Jenis Kegiatan (2)							
	Pembangunan Jalan Usaha Tani	Dusun Kaliarus	Rabat Beton Jalan Usaha Tani	500 m2		APBD Kabupaten	Rp 190.000.000
	Peningkatan Sambungan Air Bersih Ke Rumah Tangga	Dusun Kaliarus	Pemipaan dan Meter Air Bersih	30 Unit		APBD Kabupaten	Rp 50.000.000
	Penghijauan	Desa Kalilunjar	Bantuan Bibit Kelapa Genjah Entok	4 Kegiatan		APBD Kabupaten	Rp 200.000.000
Sub Total Jenis Kegiatan (3)							
	Nihil						
Sub Total Jenis Kegiatan (4)							
	Peningkatan Produksi Peternakan	Dusun Kaliarus	Bantuan Bibit Sapi Klp Tani	1 Kegiatan		APBD Kabupaten	Rp 25.000.000
Total (1 s/d 4)							Rp 465.000.000

